Dua Bulan Pertama 2022, Transaksi Kripto Capai Rp83,8 Triliun

PELAKSANA Tugas (Plt) Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Indrasari Wisnu Wardhana menuturkan transaksi nilai perdagangan aset kripto di Indonesia telah mencapai Rp83,8 triliun dalam dua bulan pertama 2022. Perdagangan aset kripto disebut mengalami peningkatan signifikan dalam dua bulan terakhir.

"Sampai Februari 2022, transaksi aset kripto telah mencapai Rp83,8 triliun dengan jumlah pelanggan 12,4 juta orang, atau bertambah sebanyak 532.102 pelanggan," paparnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR, kemarin.

Bahkan pada 2021, transaksi perdagangan aset kripto mengalami kenaikan 1.222,84% menjadi Rp859,4 triliun dari realisasi 2020 yang hanya Rp64,9 triliun. Puncak peningkatan transaksi aset kripto disebut terjadi pada April dan Mei 2021.

Wisnu mengatakan nilai transaksi perdagangan aset kripto yang fantastis itu mendorong Bappebti fokus pada ekosistem perdagangan aset tersebut.

"Pada tahun ini kegiatan lebih fokus pada pembentukan ekosistem perdagangan aset kripto. Penyusunan pertemuan pengawasan dan pelaporan pelaku usaha di bidang aset kripto dan pengembangan pengawasan aset kripto," terangnya.

Bappebti telah menetapkan jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bappebti No 7/2020, terdapat 299 aset kripto yang dapat diperdagangkan saat ini. Namun, jenis aset tersebut akan terus dievaluasi mengikuti arah perkembangan perdagangan aset kripto.

Saat ini, kata Wisnu, ada 18 calon entitas pedagang aset kripto yang terdaftar di Bappebti. Namun, dari jumlah itu, terdapat satu perusahaan yang dibekukan lantaran tidak memenuhi kewajibannya.

Dalam upaya mengendalikan dan menjaga keamanan perdagangan aset kripto, Bappebti telah menetapkan pengaturan ketentuan, antara lain pedagang aset kripto wajib melakukan *know your customer* dan *customer due diligence* atau *enhanced due diligence* saat menerima pelanggan. Jika telah sesuai, pelanggan dapat diberi akun untuk transaksi perdagangan aset kripto.

Wisnu menyampaikan, pada 2021 telah dilakukan 1.222 penindakan terhadap pelaku perdagangan berjangka komoditas (PBK) yang terdiri dari pemblokiran situs sebanyak 1.108, pemblokiran aplikasi sebanyak 88, dan pemblokiran halaman medsos sebanyak 26. (Mir/E-2)

DOK DBS

SERAHKAN HADIAH UTAMA: Head of Sales and Distribution DBS Indonesia Melfrida Gultom (kiri), nasabah DBS Treasures Yonathan Febrian (tengah), dan Regional Banking Manager Bank DBS Indonesia Novita Soeratno berbincang di depan mobil Toyota Corolla Cross Hybrid SUV dalam acara serah terima hadiah pemenang utama rangkaian acara DBSI Spring Festival: Roaring to Win 2022 di Jakarta, Rabu (23/3). Bank DBS Indonesia memberikan mobil hibrida kepada nasabah DBS Treasures sebagai salah satu wujud nyata pilar keberlanjutan dan keuangan berkelanjutan Bank DBS Indonesia dalam, mempercepat dan memperbesar dampak ESG.

Kenaikan PPN Diyakini tidak Kendurkan Kinerja

Penaikan tarif yang berdekatan dengan momentum Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri dinilai tak akan mengendurkan daya beli masyarakat.

M Ilham Ramadhan Avisena
ilham@mediaindonesia.com

KETUA Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan dunia usaha tak mempersoalkan kebijakan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) yang naik menjadi 11% mulai 1 April 2022. Menurut Hariyadi, pengambil kebijakan pasti telah menghitung dampak dari kebijakan tersebut.

"Kalau pemerintah sudah menyiapkan instrumen untuk masalah itu, ya silakan saja. Negara juga perlu peningkatan pajak. Kalau dari PPN ini yang menanggung lebih merata," ujarnya saat dihubungi, kemarin.

Menurut Hariyadi, kebijakan tarif PPN anyar itu pasti akan diimbangi dengan upaya peningkatan daya beli masyarakat. Bantuan tunai dan ragam bantuan sosial lainnya dinilai dapat mengimbangi penaikan tarif.

Karenanya, dunia usaha juga tak merasa khawatir akan ada penurunan kinerja usaha akibat kenaikan tarif PPN. Meski dinilai kurang tepat waktu, penaikan tarif yang berdekatan dengan momentum Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri dinilai tak akan mengendurkan daya beli masyarakat. "Dari sisi masyarakat memang momentum kurang pas karena mau hari raya. Kalau dari sisi pemerintah, ya bagus karena ada peningkatan penjualan dan berpengaruh pada penerimaan negara. Jadi ya kita serahkan kepada pemerintah karena mereka sudah menghitung," pungkasnya.

Diketahui, sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tarif PPN 11% tetap akan berlaku mulai 1 April 2022. Pemerintah beranggapan tak ada urgensi untuk menunda kebijakan tersebut meski diakui perekonomian belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi covid-19 dan dinamika global.

Menkeu mengatakan penaikan tarif PPN disebut sebagai salah satu cara mewujudkan keadilan perpajakan. Sri Mulyani menyampaikan penaikan tarif juga merupakan upaya untuk memperkuat fondasi perpajakan dan mengoptimalisasi penerimaan negara.

Beri catatan

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik Suryadi Sasmita menuturkan pengusaha sejatinya menerima keputusan penaikan tarif PPN menjadi 11%. Namun, penerimaan itu diikuti dengan dua syarat yang telah disampaikan kepada pengambil kebijakan. "Jadi kami menerima penaikan tarif PPN menjadi 11% itu, tapi dengan catatan," ujarnya saat dihubungi, kemarin.

Catatan pertama, yakni pemerintah mesti mengecualikan pengenaan PPN atas bahan-bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat. Kadin, kata Suryadi, sedari awal mendorong agar pemerintah tak menjadikan bahan-bahan pokok sebagai objek PPN.

Kalaupun mau dijadikan sebagai objek PPN, pemerintah mesti menanggung pengenaan tarif pajak atas bahan-bahan pokok. "Pemerintah mesti menggunakan pungutan yang 11% itu untuk membantu rakyat kecil. Itu yang kita mohon kepada pemerintah. Dengan penaikan tarif, kompensasinya ialah di-*absorb* semua yang untuk rakyat kecil," imbuh Suryadi.

Pemerintah, kata dia, mesti melakukan hal yang sama seperti insentif mobil, properti, yang PPN-nya di-*absorb* oleh pemerintah. "Jadi pemerintah jangan mau enak saja, mengambil pajak tapi tidak membantu yang di bawah," tambahnya.

Catatan kedua ialah pemerintah mesti memastikan bantuan sosial kepada masyarakat tersalur dengan baik. Salah satu tujuannya untuk menghindari peningkatan inflasi yang bisa menggerus daya beli masyarakat.

Terlebih, penaikan tarif PPN dilakukan pada momen Ramadan dan Idul Fitri yang umumnya kebutuhan masyarakat meningkat. "Karena ada kekhawatiran inflasi, kami meminta pemerintah menambah BLT agar daya beli masyarakat tetap ada. Karena ekonomi itu naik dari bawah, bukan dari atas," terang Suryadi. (E-3)

BNI-Grab Pacu KUR dan Digitalisasi Pedagang

PT Bank Negara Indonesia (BNI) menggandeng Grab Indonesia untuk mendongkrak penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) berkualitas sekaligus digitalisasi pedagang. Kolaborasi BNI-Grab Indonesia tersebut menargetkan pedagang Pasar Tomang Barat sebagai langkah awal kerja sama.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang ikut menyaksikan penandatanganan kerja sama itu menyampaikan pemerintah akan selalu proaktif memberi dukungan kepada pedagang pasar untuk menjadi penerima KUR BNI, sekaligus *onboarding* di Grab Merchant di dalam layanan Grab Mart dari Grab.

"Kolaborasi antara Grab Indonesia dan BNI bertujuan memperkuat fondasi pedagang pasar tradisional dengan platform penjualan *online*, memperluas akses pembayaran bagi pelanggan dengan kartu kredit dan kartu debit BNI, serta melakukan *onboarding* untuk pedagang pasar tradisional dengan program Debitur KUR BNI," ujarnya, kemarin.

Di kesempatan yang sama, Presiden Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata mengatakan, di tengah kondisi saat ini, digitalisasi menjadi salah satu faktor penting bagi UMKM untuk bisa terus bertahan dan berkembang. Untuk itu, Grab Indonesia berkomitmen untuk memberikan akses digital seluas-luasnya bagi seluruh UMKM, termasuk para pedagang pasar.

Sementara itu, Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Sis Apik Wijayanto mengatakan dukungan pembiayaan bagi UMKM melalui skema KUR menjadi salah satu dukungan paling penting bagi UMKM untuk terus tumbuh, khususnya di tengah pandemi. Pada tahun ini, BNI telah mengalokasikan sekitar Rp38 triliun KUR untuk UMKM, termasuk di antaranya para pedagang di Pasar Tomang Barat.

"Dukungan BNI terhadap UMKM diperkuat melalui kolaborasi dengan Grab. Kerja sama ini mengintegrasikan fasilitas pembiayaan dari kami dengan upaya digitalisasi yang memungkinkan pelaku UMKM untuk lebih efisien dan lincah tumbuh di tengah pandemi," pungkasnya. (Mir/E-2)

PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Jl Honoris Raya Kav 6 Kota Modern (Modern Land) Kota Tangerang 15117
Telp : (021) 55781888 Fax : (021) 5529480, Email : corporate.secretary@mayapadahospital.com

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

ASET	31 Desember 2021	31 Desember 2020
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	700.922.360	597.785.407
Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya	-	55.392.316
Piutang Usaha		
Pihak berelasi	13.848.726	4.962.517
Pihak ketiga - neto	220.052.635	220.460.305
Piutang lain-lain		
Pihak berelasi	1.404.496	-
Pihak ketiga - neto	6.793.936	5.236.877
Persediaan	70.409.082	74.691.221
Uang muka	2.900.786	2.034.924
Biaya dibayar dimuka	3.822.886	2.833.682
Pajak dibayar dimuka	1.299.630	7.293
Total Aset Lancar	**1.021.454.537**	**963.404.541**
ASET TIDAK LANCAR		
Uang muka pembelian aset tetap	36.491.564	16.208.297
Aset tetap - neto	3.169.775.594	2.718.017.328
Properti investasi	40.010.000	40.010.000
Aset tak berwujud - neto	18.016.628	14.713.430
Aset hak guna - neto	280.850.298	308.029.360
Taksiran tagihan pajak penghasilan	1.292.381	1.292.381
Aset pajak tangguhan - neto	66.145.031	46.883.178
Goodwill	237.770.574	237.770.574
Total Aset Tidak Lancar	**3.850.352.071**	**3.382.924.547**
TOTAL ASET	**4.871.806.608**	**4.346.329.088**

LIABILITAS DAN EKUITAS	31 Desember 2021	31 Desember 2020
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang bank jangka pendek		
Pihak berelasi	589.152.778	201.000.000
Pihak ketiga	-	20.000.000
Utang usaha	192.301.032	175.206.597
Utang kontraktor	140.006.887	35.529.546
Utang lain-lain		
Pihak berelasi	1.514.060.365	1.085.218.612
Pihak ketiga	30.502.176	30.568.545
Utang pajak	14.970.178	5.880.237
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang	-	-
Utang bank		
Pihak berelasi	15.166.028	9.150.052
Pihak ketiga	37.131.695	12.415.000
Utang pembiayaan	1.570.320	-
Pendapatan sewa diterima dimuka		
Pihak berelasi	101.600	757.896
Pihak ketiga	836.525	545.386
Total Liabilitas Jangka Pendek	**2.659.180.899**	**1.671.377.305**
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian jangka pendek		
Utang bank		
Pihak berelasi	23.254.685	38.420.713
Pihak ketiga	176.336.374	791.265.456
Utang pembiayaan	3.582.839	-
Pendapatan sewa diterima di muka		
Pihak berelasi	-	211.737
Pihak ketiga	-	1.019.809
Liabilitas imbalan pascakerja	82.049.265	89.297.794
Total Liabilitas Jangka Panjang	**285.223.164**	**920.215.510**
Total Liabilitas	**2.944.404.063**	**2.591.592.815**
EKUITAS		
Modal saham nilai nominal Rp 100 per saham		
Modal dasar - 48.000.000.000 saham tahun 2021 dan 20.000.000.000 saham tahun 2020		
Modal ditempatkan dan disetor - 12.000.705.445 saham pada tahun 2021 dan 2020	1.200.070.545	1.200.070.545
Tambahan modal disetor - bersih	1.124.816.856	1.124.816.856
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	36.805.871	29.748.912
Saldo laba (defisit)		
Ditentukan penggunaannya	2.000.000	2.000.000
Belum ditentukan penggunaannya	(437.380.568)	(602.688.806)
Total Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	**1.926.312.704**	**1.753.947.506**
Kepentingan non pengendali	1.089.841	788.766
Total Ekuitas	**1.927.402.546**	**1.754.736.273**
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**4.871.806.608**	**4.346.329.088**

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah kecuali dinyatakan lain)

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Pendapatan	1.924.453.141	1.283.798.609
Beban langsung	(1.219.420.404)	(870.049.154)
Laba Bruto	**705.032.737**	**413.749.455**
Beban penjualan	(16.138.644)	(10.542.220)
Beban umum dan administrasi	(462.409.623)	(387.353.929)
Laba Usaha	**226.484.470**	**15.853.307**
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
Pendapatan bunga	23.940.936	26.470.100
Beban keuangan	(118.034.051)	(70.561.549)
Lain-lain - neto	24.028.155	28.429.533
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**156.419.510**	**191.390**
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan		
Pajak kini	(12.069.226)	-
Pajak tangguhan	21.253.763	(14.689.448)
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan - neto	**9.184.537**	**(14.689.448)**
Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan	**165.604.047**	**(14.498.058)**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi dalam periode berikutnya:		
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	9.054.136	7.358.311
Pajak penghasilan terkait	(1.991.910)	(2.361.493)
Penghasilan Komprehensif lain - neto setelah pajak	**7.062.226**	**4.996.818**
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**172.666.273**	**(9.501.240)**
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada:		
Pemilik entitas induk	165.308.239	(14.380.627)
Kepentingan non-pengendali	295.808	(117.431)
	165.604.047	**(14.498.058)**
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak Yang Dapat Diatribusikan Kepada:		
Pemilik entitas induk	7.056.959	4.993.413
Kepentingan non-pengendali	5.267	3.405
	7.062.226	**4.996.818**
Total laba (rugi) Komprehensif Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada:		
Pemilik entitas induk	172.365.198	(9.387.214)
Kepentingan non-pengendali	301.075	(114.026)
	172.666.273	**(9.501.240)**
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (Rupiah penuh)	**13,77**	**(1,20)**

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan kas dari pelanggan	1.917.035.105	1.206.282.382
Pembayaran kas kepada pemasok	(782.054.152)	(523.160.332)
Pembayaran kas kepada karyawan	(700.717.425)	(518.122.857)
Kas dihasilkan dari operasi	**434.263.528**	**164.999.193**
Penerimaan bunga	23.940.936	26.470.100
Pembayaran beban pajak	(6.292.867)	(2.085.523)
Pembayaran beban keuangan	(115.124.935)	(100.262.493)
Kas Neto diperoleh dari Aktivitas Operasi	**336.786.663**	**89.121.277**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Perolehan dan uang muka pembelian aset tetap	(464.023.277)	(511.111.413)
Hasil penjualan aset tetap	313.000	108.657
Perolehan aset takberwujud	(3.165.516)	(11.378.623)
Pembayaran untuk piutang lain-lain kepada pihak berelasi	(1.404.496)	-
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	**(468.280.289)**	**(522.381.378)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan dari utang lain-lain kepada pihak berelasi - neto	428.841.753	342.308.233
Penerimaan utang bank jangka pendek	390.000.000	171.000.000
Pembayaran utang bank jangka pendek	(20.000.000)	(24.678.570)
Penerimaan utang bank jangka panjang	220.000.000	830.000.000
Pembayaran utang bank jangka panjang	(839.428.500)	(134.309.028)
Pembayaran utang pembiayaan	(174.990)	-
Pembayaran liabilitas sewa	-	(330.000.000)
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	**179.238.263**	**854.320.636**
KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS	**47.744.637**	**421.060.534**
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**653.177.723**	**232.117.189**
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**700.922.360**	**653.177.723**
Kas dan setara kas termasuk:		
Kas dan setara kas	700.922.360	597.785.407
Kas yang dibatasi penggunaannya	-	55.392.316
Total	**700.922.360**	**653.177.723**

CATATAN :

1 Laporan Keuangan Konsolidasian PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan, dengan opini tanpa modifikasian, sebagaimana tercantum dalam laporan tertanggal 18 Maret 2022

2 Laporan Keuangan Konsolidasian Tahunan PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan, dengan opini tanpa modifikasian, sebagaimana tercantum dalam laporan tertanggal 7 Juni. 2021

3 Kurs tutup buku per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing - masing sebesar 1 USD = Rp14.270,- dan 1 USD = Rp14.105,-

Tangerang, 25 Maret 2022
S.E.& O.

PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk dan Entitas Anak
DIREKSI